

HAMBATAN TIONGKOK DALAM MEWUJUDKAN REUNIFIKASI DENGAN TAIWAN

Sitihatija Nurhuda Talaohu¹

Abstract

This thesis attempts to explain what factors become the obstacles of China in achieving reunification with Taiwan. Reunification has been a very urgent necessity for China to make Taiwan recognize as part of the People's Republic of China and reunite with them. Many efforts have been made by China to reunite Taiwan, one of them by offering a "One Country Two Systems" model that will make Taiwan as a Special Administrative Region of China where Taiwan can regulate its own life as before. However, with "One Country Two Systems" model has not been able to make China succeed in achieving reunification. Using the theory of integration by Michael Haas, the obstacles of China in achieving reunification with Taiwan caused by several factors which are the differences in political ideology between China and Taiwan and also Taiwan prefer to be a sovereign state.

Keywords: *China, Taiwan, Reunification, One Country Two Systems, Political Status*

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Korespondensi: sitihatijanurhuda@gmail.com

PENDAHULUAN

Tiongkok merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Timur, tepatnya berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, Laut Tiongkok Timur, Korea Utara, dan Vietnam. Tiongkok dengan nama resmi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki pusat pemerintahan di Beijing sebagai ibukotanya. Negara yang sering disebut sebagai “Negeri Tirai Bambu” ini merupakan negara terbesar secara ekonomi, geografis, dan jumlah penduduk. Luas wilayah Tiongkok adalah sebesar 9.6 juta kilometer persegi dan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.38 milyar jiwa yang terdiri dari etnis Han sebanyak 91.6%, etnis Zhuang 1.3%, dan etnis lainnya berjumlah 7.1%. Tiongkok memiliki dua Daerah Administratif Khusus yaitu Hong Kong dan Macao, serta terdiri dari 23 provinsi (Central Intelligence Agency, 2019).

Republik Rakyat Tiongkok tidak hanya memiliki wilayah kedaulatan di daerah Tiongkok Daratan saja, namun juga pada kepulauan yang berada di sekitarnya. Salah satu kepulauan yang menjadi bagian dari kekuasaan Tiongkok adalah Pulau Formosa atau Taiwan dimana Tiongkok menjadikan pulau tersebut sebagai salah satu provinsinya. Tiongkok dengan Taiwan berasal dari satu rumpun yang sama. Hal ini dikarenakan kedua wilayah ini memiliki letak geografis yang begitu dekat. Taiwan berada di sebelah pantai Tenggara Tiongkok Daratan yang berbatasan dengan sebuah selat bernama *Formosa Strait* atau Selat Taiwan. Selat ini sekaligus sebagai pembatas antara Tiongkok dan Taiwan sebagaimana yang ditampilkan pada gambar 1.1. Karena berasal dari satu rumpun yang

sama, Tiongkok dan Taiwan memiliki banyak sekali kesamaan seperti karakteristik dari dan budaya yang dimiliki oleh keduanya (Jacobs, 2011).

Gambar 1.1.

Peta Wilayah Republik Rakyat Tiongkok



(Vector Stock, 2019)

Sejarah awal Taiwan sebagai bagian dari wilayah Tiongkok dimulai pada tahun 1271 sampai 1368. Pada saat itu, Tiongkok dikuasai oleh Dinasti Yuan yang dipimpin oleh penguasa Mongol bernama Kubilai Khan. Dinasti Yuan memiliki wilayah kekuasaan yang sangat besar dimana meliputi seluruh wilayah Daratan Tiongkok hingga ke wilayah Asia Barat. Selama dipimpin oleh Dinasti Yuan, Tiongkok kerap melakukan aktivitas perdagangan di berbagai wilayah, salah satunya yaitu di Pulau Taiwan (Lijun, 2001). Pada pertengahan abad ke-16, Pulau Taiwan diduduki oleh Penjajah Barat yaitu Spanyol yang kemudian di ambil alih oleh Penjajah Belanda pada tahun 1642 setelah berhasil mengalahkan Spanyol. Kemudian, pada

tahun 1662 Belanda dikalahkan oleh Pahlawan Nasionalis Tiongkok bernama Zheng Chenggong yang berhasil merebut Taiwan dan menjadikan pulau tersebut sebagai bagian dari Tiongkok (Andrade, 2004).

Pada tahun 1895, ketika Tiongkok dikuasai oleh Dinasti Qing, Tiongkok terlibat peperangan dengan Jepang yang dinamakan Perang Jiawu. Ini merupakan perang pertama diantara Tiongkok dengan Jepang yang membuat Tiongkok mengalami kekalahan sehingga Dinasti Qing harus menandatangani sebuah traktat yang disebut sebagai *Treaty of Shimonoseki* atau di Tiongkok dikenal dengan *Treaty of Maguan*. Salah satu butir dalam traktat ini mengharuskan Tiongkok menyerahkan Pulau Taiwan kepada Kekasairan Jepang. Sehingga, Jepang menguasai Pulau Taiwan selama kurang lebih 50 tahun (Birbudak, 2017). Jepang menggunakan Pulau Taiwan sebagai basis ekspansi kolonial ke wilayah Asia Tenggara dan Pasifik selama terjadinya Perang Dunia II. Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945, Jepang mengalami kekalahan dan menyerahkan kembali wilayah Taiwan kepada Tiongkok dan membuat Taiwan kembali berada dibawah kendali Tiongkok secara penuh (Central Intelligence Agency, 2019).

Secara geografis dan historis, Taiwan merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok dan dijadikan sebagai salah satu provinsi Tiongkok. Meskipun Tiongkok mengklaim pulau Taiwan sebagai wilayahnya, Tiongkok sampai sekarang tidak dapat menguasai pulau tersebut sebagai wilayah kedaulatannya. Hal ini dikarenakan Taiwan tidak mengakui sebagai

bagian dari wilayah Tiongkok. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkang. Sehingga, Tiongkok merasa perlu untuk melindungi wilayah Taiwan agar tidak lepas dan mengakui sebagai bagian dari Tiongkok dengan mengusung reunifikasi diantara keduanya. Reunifikasi yang dimaksud adalah penyatuan kembali Taiwan dengan Tiongkok menjadi satu wilayah kedaulatan dengan Tiongkok sebagai pusatnya (Faust, 2005).

Penyatuan kembali Taiwan dengan Tiongkok telah menjadi agenda inti Republik Rakyat Tiongkok dalam mengamankan wilayah kedaulatannya. Upaya untuk penyatuan kembali ini telah dilakukan oleh Tiongkok sejak lama, yaitu sejak Tiongkok dipimpin oleh Mao Zedong (pemimpin pertama Republik Rakyat Tiongkok). Mao melakukan berbagai upaya agar Taiwan dapat kembali menyatu dengan Tiongkok dibawah pemerintahan PKT. Mao lebih cenderung menggunakan cara-cara yang agresif terhadap Taiwan agar pulau tersebut dapat tunduk kepada pemerintahan Mao. Meskipun telah mengerahkan *power*-nya, Mao gagal untuk membuat Pulau Formosa kembali menyatu dengan Tiongkok. Selain Mao, para pemimpin Tiongkok selanjutnya juga berusaha agar Taiwan bersatu kembali dengan Tiongkok. Pada saat Tiongkok dipimpin oleh Deng Xiaoping, Tiongkok mengupayakan penyatuan kembali kepada Taiwan dengan menawarkan reunifikasi secara damai namun Deng juga gagal menyatukan kembali Taiwan dengan Tiongkok (Scobel, 2004).

Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin lainnya termasuk Xi Jinping.

Penyatuan kembali Taiwan dengan Tiongkok menjadi prioritas utama bagi Xi. Berbagai usaha telah dilakukannya untuk mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan mulai dari cara-cara yang damai sampai menggunakan cara yang mengancam bagi Taiwan. Meskipun demikian, sampai sekarang Xi juga belum dapat mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan yang sudah dari lama menjadi tujuan bagi Republik Rakyat Tiongkok. Untuk menjelaskan mengenai hambatan tersebut, penulis menggunakan Teori Integrasi yang dikemukakan oleh Michael Haas.

Teori Integrasi

Integrasi merupakan sebuah proses dimana aktor-aktor politik di beberapa wilayah yang berbeda terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan, dan kegiatan politik mereka menuju pusat yang baru dimana menuntut yuridiksi atas status nasional yang sudah ada sebelumnya. Seorang ilmuwan politik Amerika bernama Michael Haas menyebutkan bahwa terdapat dua faktor penting dalam menentukan apakah masyarakat dan negara dapat mencapai tingkat penyatuan atau integrasi yaitu dengan *attitudinal factor* dan *material conditions*. *Attitudinal Factor* yaitu integrasi akan terjadi jika baik elit politik atau publik, keduanya memiliki opini yang sama dalam mendukung terjadinya kemajuan integrasi. Sedangkan *Material Conditions* yaitu integrasi akan terjadi ketika kedua pihak yang terlibat melakukan kontak antar satu sama lain, seperti komunikasi, perdagangan, dan lain sebagainya (Haas, 1984).

Dalam *Attitudinal Factor*, baik elit politik maupun publik Tiongkok setuju atau

mendukung terjadinya penyatuan diantara Tiongkok dengan Taiwan. Namun, Taiwan tidak memiliki opini yang sama dengan Tiongkok. Baik elit politik dan publik Taiwan tidak menginginkan adanya penyatuan dengan Tiongkok. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan ideologi politik antara keduanya yaitu Tiongkok menganut komunis dan Taiwan menganut demokrasi sehingga bagi Taiwan, perbedaan ideologi ini tidak dapat berdiri dibawah pemerintah Komunis yang dianggap otoriter. Alasan lain adalah karena Taiwan lebih memilih untuk independen sebagai negara yang berdaulat sebagaimana status quo yang telah ada sejak lama (Wong, 2019). Sedangkan dalam *Material Conditions*, Tiongkok dan Taiwan telah menjalin hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dimana Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi Taiwan (Parmer, 2019).

Sehingga, berdasarkan pada aplikasi teori ini, hambatan Tiongkok dalam mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Adanya perbedaan ideologi politik
- Taiwan lebih memilih untuk menjadi negara yang berdaulat

PEMBAHASAN

A. Adanya Perbedaan Ideologi Politik yang Tidak dapat Disatukan

1. Ideologi Politik Tiongkok

Republik Rakyat Tiongkok menganut ideologi politik komunis. Ideologi komunis atau Komunisme menurut Bahasa yaitu paham kebersamaan. Sedangkan,

komunisme dalam pengertian arti sosial yaitu merujuk pada kumpulan doktrin Marxis, kritik yang dibuat oleh Marxis terhadap kapitalisme dan teori liberal, prediksi tentang terciptanya revolusi proletarian yang melahirkan suatu masyarakat komunis yang bebas dari kemiskinan, tanpa adanya kelas, tanpa pembagian kerja yang timpang, serta tanpa adanya institusi yang menjadi alat penindasan dan dominasi dari kelas satu atas kelas lainnya. Paham Komunis pertama kali dicetus oleh Karl Marx pada tahun 1840-an (Mubarok, 2017).

Tiongkok merupakan salah satu negara yang telah berhasil dipengaruhi oleh ideologi komunis. Paham ini masuk ke wilayah Tiongkok berasal dari Uni Soviet sebagai satu-satunya negara yang menganut prinsip-prinsip komunisme pada saat itu (Wicaksono, 2017). Meskipun Tiongkok menganut paham yang sama dengan Uni Soviet yang berasal dari pemikiran Karl Marx, komunisme yang berkembang di Tiongkok tidak memiliki makna yang sama dengan komunisme Marxisme-Leninisme. Hal ini dikarenakan Mao Zedong sebagai pemimpin Tiongkok pada saat itu lebih memilih menganut paham komunis dengan gayanya sendiri yaitu memadukan gagasan Marxisme-Leninisme dengan

situasi objektif di Tiongkok, pengetahuan intelektualnya, dan perjuangan-perjuangan revolusinya. Sehingga, Mao telah memperbarui makna baru terhadap makna komunisme karena ia tidak sepakat dengan adanya model kepemimpinan kolektif dalam partai dan negara sebagaimana yang dirumuskan oleh Lenin (Komunisme di Rusia). Mao justru menciptakan kultur individu dimana membuat pemimpin partai sebagai satu-satunya orang yang berhak menentukan arah kebijakan (Mubarok, 2017).

PKT hadir sebagai satu-satunya partai politik yang berkuasa di Tiongkok. Dengan menguasai negara yang disebut sebagai Negeri Tirai Bambu ini, mereka menjadikan paham komunis sebagai dasar ideologi dan menerapkannya di setiap lapisan kehidupan Tiongkok baik sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, Ideologi komunis memberikan pengaruh yang besar terhadap setiap aspek dalam kehidupan di Tiongkok terutama aspek politik. Tiongkok yang menganut ideologi politik komunis dengan sistem satu partai membuat negara ini tidak menyelenggarakan pemilihan umum secara terbuka untuk memilih pemimpin dikarenakan hanya memiliki satu partai yaitu PKT sehingga pemimpin tertinggi Tiongkok sejak negara ini merdeka pada tahun

1949 hingga sekarang berasal dari PKT itu sendiri.

Jika di negara lain pemimpin mereka dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, di Tiongkok calon pemimpinnya telah ditetapkan melalui Kongres Nasional PKT. Selain itu, Jika di negara lain seorang presiden merupakan pemimpin tertinggi bagi negaranya, hal ini berbeda dengan Tiongkok dimana pemimpin tertinggi merupakan seorang yang menjabat sebagai pemimpin tertinggi di PKT. Hal tersebut dikarenakan PKT merupakan partai yang memiliki kekuasaan absolut dalam memimpin Tiongkok dan sudah ada sejak kepemimpinan Mao Zedong. Sehingga, ini menjadikan pemimpin tertinggi PKT memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan.

Xi Jinping sebagai pemimpin Tiongkok sangat menjunjung tinggi komunisme gaya Tiongkok. Ia mengatakan bahwa seorang pemimpin Tiongkok haruslah Merah yang memiliki makna loyal kepada PKT, pemimpinnya, dan akar ideologisnya di saat baik maupun buruk. Untuk itu, hal ini menjadikan Xi sebagai pemimpin yang paling Merah di generasinya. Xi sendiri memegang tiga jabatan sekaligus yaitu sebagai seorang Presiden, Sekertaris Jenderal PKT, dan Ketua Militer Pusat PKT sehingga Xi memiliki kekuasaan

penuh dalam menggunakan kekuasaan de factonya untuk memerintah Tiongkok secara otoriter. Dengan keambisan dan otoriternya ini, ia dikenal oleh orang-orang Tiongkok sebagai Mao Zedong kedua. Dengan memegang kekuatan sebagai pemimpin Tiongkok, ia menjadikan dirinya sebagai pemimpin seumur hidup sama seperti yang dilakukan oleh pemimpin Mao.

Xi merupakan pemimpin yang dikenal sangat otoriter dengan menjadikan PKT memiliki otoritas yang lebih besar atas sebagian besar lapisan masyarakat. Setiap komponen yang menjadi bagian dari Tiongkok diharuskan untuk mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh PKT. Setiap komponen yang dimaksud adalah baik publik maupun elit Tiongkok itu sendiri. Selain itu, mereka tidak diperbolehkan untuk melawan PKT karena tidak ada toleransi bagi siapa saja yang menunjukkan perlawanan terhadap PKT dan Xi Jinping sebagai pemimpin tertinggi. Hal ini yang kemudian menjadikan Tiongkok sebagai negara yang otoriter dimana menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan kebebasan di negaranya sendiri (Devries, 2019).

2. Ideologi Politik Taiwan

Taiwan menganut ideologi politik demokrasi. Demokrasi bertujuan untuk menciptakan

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui adanya keiuksertaan masyarakat didalam pengambilan keputusan pada sistem politik, ekonomi, maupun sosial. Demokrasi menjunjung tinggi hak asasi manusia serta hak politik setiap individu yang ada dalam masyarakat. Awal mula Taiwan menganut ideologi politik ini yaitu ketika Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) yang mengalami kekalahan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada Perang Saudara tahun 1949 dan kabur ke Taiwan membawa pemerintahan nasionalis yang masih tersisa serta ideologi yang dianut mereka.

Pada saat itu, KMT masih dipimpin oleh Chiang Kai-Shek membawa ideologi yang dirancang oleh Sun Yat Sen (pemimpin Republik Tiongkok sebelum adanya Republik Rakyat Tiongkok). Ideologi tersebut dikenal sebagai “Tiga Prinsip Rakyat” atau dalam bahasa Mandarin yaitu 三民主意 (pinyin: *Sānmín Zhǔyì*). Ideologi ini memiliki tiga prinsip dasar yaitu *min t’sen* (kebangsaan atau nasionalisme), *min tsu* (kerakyatan atau demokrasi), dan *min sheng* (kesejahteraan atau sosialisme) (Sen, 1924). Paham ini kemudian dijadikan sebagai dasar untuk membentuk pemerintah pusat yang demokratis di Taiwan.

Sebelum Taiwan menjalankan demokrasi secara penuh, wilayah ini masih menjadi pemerintahan darurat yang telah berlangsung selama 38 tahun yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan diteruskan oleh anaknya bernama Chiang Ching-Kuo hingga tahun 1978. Chiang kemudian mencabut status darurat militer Taiwan pada tahun 1987. Pada tahun 1996, Taiwan pertama kali mengadakan pemilihan umum secara terbuka yang berhasil menjadikan Lee Teng Hui sebagai presiden pertama Taiwan yang terpilih secara demokratis (Marboen, 2015). Sejak saat itu, Taiwan sangat menjunjung tinggi demokrasi dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial dan politiknya. Warga Taiwan diberikan kebebasan untuk berserikat dan berbicara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konstitusi Taiwan dimana menjamin kebebasan berbicara, mengajar, menulis, menerbitkan, berkumpul dan berserikat untuk warga negaranya.

Dengan demokrasi, Taiwan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden setiap empat tahun sekali yang dipilih langsung oleh masyarakat Taiwan. Pemimpin tertinggi Taiwan adalah seorang presiden yang menjabat sebagai kepala negara dan panglima angkatan bersenjata. Sebelum dicabutnya pemerintahan darurat

militer, Taiwan hanya dikuasai oleh KMT sebagai satu-satunya partai yang ada di Taiwan. Setelah pemerintahan darurat militer dicabut dan adanya pengaruh demokrasi di Taiwan telah membuat wilayah ini terdiri dari multi partai dimana terdapat Partai Nasionalis Kuomintang (KMT), Partai Progresif Demokratik (DPP), Partai Kekuatan Baru (*New Power Party*), Partai Pertama Rakyat (*People First Party*), dan partai-partai kecil lainnya.

Taiwan begitu menjunjung tinggi nilai-nilai universal perdamaian, hukum, kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sehingga, Taiwan berkomitmen untuk mempertahankan kebebasan dan demokrasi sebagai jalan hidupnya (Salengke, 2016). Salah satu komitmen Taiwan ini ditunjukkan dengan adanya rencana pembangunan nasional dengan lima tujuan untuk mewujudkan Taiwan yang lebih kuat yang dibuat oleh pemerintah Taiwan. Tujuan yang dimaksud yaitu dengan Taiwan yang berbudaya, energi terbarukan, negara digital, masyarakat yang adil, dan tanah air yang bahagia. Pada poin keempat yaitu masyarakat yang adil merupakan tujuan yang berdasarkan pada demokrasi dimana Taiwan memberlakukan reformasi pensiun dan keadilan transnasional, melindungi hak-hak pekerja, meningkatkan keamanan pekerja dan upah minimum, dan

meningkatkan kesetaraan gender (Kementerian Luar Negeri Taiwan, 2019).

3. Pengaruh Perbedaan Ideologi Politik terhadap Reunifikasi

Seperti yang telah sebelumnya bahwa Tiongkok menganut ideologi politik komunis sehingga menjadikan Partai Komunis Tiongkok (PKT) sebagai satu-satunya partai politik yang berkuasa disana sehingga hal ini membuat PKT menjalankan roda pemerintahan Tiongkok secara otoriter dan membatasi kebebasan dari masyarakat Tiongkok. Berbeda dengan Taiwan yang menganut ideologi politik demokrasi dimana terdiri dari banyak partai politik dan menjunjung tinggi kebebasan serta menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap komponen yang ada di dalam masyarakat Taiwan. Ideologi politik yang dianut oleh Tiongkok dan Taiwan menunjukkan kebalikan antar satu sama lain sehingga menjadi faktor penghambat bagi Tiongkok dalam mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan.

Untuk mewujudkan reunifikasi, perlu adanya kerjasama yang baik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ketika hanya satu pihak saja yang berusaha dengan keras mewujudkan terjadinya penyatuan, maka hal ini akan membuat “penyatuan” hanya sebatas impian semata atau jika memungkinkan sekalipun akan

membutuhkan waktu yang lama. Meskipun bagi Xi Jinping perbedaan ideologi bukan merupakan masalah yang besar dalam mewujudkan reunifikasi antara Tiongkok dan Taiwan, namun Taiwan tidak menganggap demikian. Bagi Taiwan, adanya perbedaan ideologi antara keduanya merupakan sebuah masalah besar sehingga ideologi politik keduanya tidak dapat disatukan karena ideologi politik antara Tiongkok dan Taiwan tidak dapat berdiri di bawah satu pemerintahan atau negara yang sama.

Tiongkok telah menemukan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi perbedaan ideologi antara Tiongkok dan Taiwan ketika keduanya bersatu di bawah kekuasaan Tiongkok yaitu dengan model “Satu Negara Dua Sistem” yang menjadikan Taiwan sebagai Daerah Administratif Tiongkok (Faust, 2005). Melalui kebijakan tersebut, Taiwan tetap dapat mempertahankan ideologi politiknya seperti sekarang ini. Hanya saja yang membedakan adalah Taiwan harus mengakui sebagai bagian dari wilayah Tiongkok dan menyerahkan kedaulatannya untuk dipegang oleh Tiongkok yang ditunjukkan dengan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Perbedaan ideologi politik antara Tiongkok dan Taiwan menjadi hal serius untuk

diperhatikan. Meskipun melalui model “Satu Negara Dua Sistem” akan memberikan kebebasan bagi Taiwan untuk mengatur kehidupannya sendiri seperti Taiwan untuk menjalankan ideologi dan sistem pemerintahannya sendiri, hak dan kebebasannya akan dijamin oleh pemerintah Tiongkok, serta tidak akan ada intervensi dari Tiongkok terhadap Taiwan, hal ini tidak membuat Taiwan menyetujui untuk menerima reunifikasi dibawah kebijakan tersebut. Taiwan tidak mempercayai pemerintah Tiongkok jika mereka akan dengan sungguh-sungguh memberikan kebebasan kepada Tiongkok sebagaimana yang dijanjikan melalui kebijakan tersebut. Ketidakpercayaan ini karena pemerintah Tiongkok yang dikenal sangat otoriter dibawah kepemimpinan Xi Jinping dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) akan memiliki kekuasaan lebih tinggi diatas Taiwan dimana dapat membuat mereka kapan pun bisa mengganggu kebebasan Tiongkok terutama menerapkan ideologi politik yang sangat kontras dari pihak komunis yaitu demokrasi.

Penolakan Taiwan terhadap reunifikasi dibawah model “Satu Negara Dua Sistem” bukan hanya sekedar kecurigaan semata terhadap pemerintah komunis di Tiongkok, hal ini diperkuat dengan apa yang terjadi di Hong Kong. Sebagai sebuah daerah otonomi khusus yang juga bersatu dengan Tiongkok

dibawah model “Satu Negara Dua Sistem” dengan mendapatkan *high degree of autonomy* yang memberikan hak dan kebebasan untuk menjalankan ideologi dan sistem politiknya sendiri sejak tahun 1997 silam, kini Hong Kong mengalami krisis politik dimana demokrasi mereka diintervensi oleh pemerintah pusat komunis yang melakukan tindakan represif terhadap Hong Kong sehingga memicu terjadinya sebuah demonstrasi besar-besaran untuk memperjuangkan demokrasi Hong Kong dalam sebuah gerakan bernama *The Umbrella Movement* pada tahun 2014 (Aulia, 2019).

Adanya protes di Hong Kong bertepatan dengan adanya reunifikasi dibawah model “Satu Negara Dua Sistem” yang pertama kali ditawarkan Xi Jinping terhadap Taiwan membuat warga Taiwan secara tegas menolak reunifikasi tersebut. Dengan merespon permasalahan terhadap model “Satu Negara Dua Sistem” yang telah diterapkan lebih dulu di Hong Kong dan dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama ekonomi antara kedua pemimpin Lintas-Selat membuat warga Taiwan mengadakan sebuah gerakan bernama *Sunflower Movement* pada tahun 2014 untuk menentang peningkatan hubungan dengan Tiongkok dan menolak reunifikasi dibawah model tersebut karena menganggap demokrasi

tidak dapat berjalan dengan baik di bawah pemerintah komunis yang otoriter (Ricking, 2014).

Apa yang terjadi di Hong Kong membuat Taiwan tidak percaya terhadap pemerintah komunis untuk benar-benar mentolerir perbedaan ideologi politik ketika terjadinya reunifikasi diantara keduanya sekalipun diberikan kebebasan untuk mempertahankan dan menjalankan demokrasi dibawah model “Satu Negara Dua Sistem” ini. Tiongkok sebagai pemerintah pusat yang menganut paham komunis dan dikenal sebagai pemerintah yang otoriter tetap memiliki kekuasaan lebih tinggi sehingga akan ada kemungkinan untuk membatasi kebebasan Taiwan. Berdasarkan pada jajak pendapat yang dilakukan oleh *Mainland Affairs Council Republic of China* di Taiwan menunjukkan bahwa sebagian besar warga Taiwan menolak usulan reunifikasi dan dengan tegas akan berdiri untuk membela diri ketika kebebasan dan demokrasi di Taiwan terancam (Mainland Affairs Council, 2018).

Bukan hanya warga Taiwan, bagi pemerintah Taiwan pun tidak menyetujui untuk mewujudkan reunifikasi dengan Tiongkok dibawah model “Satu Negara Dua Sistem”. Banyak, demokrasi Taiwan tidak dapat berdiri dibawah pemerintah komunis yang otoriter karena akan mengancam terhadap

kebebasan warga negaranya. Seperti yang disampaikan langsung oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen dalam pidatonya pada tanggal 10 Oktober 2018 yaitu:

“Kami bertekad untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi Taiwan yang beragam. Tetapi ketika negara lain berniat untuk mengambil keuntungan dari kebebasan masyarakat kita, menyusup ke masyarakat, dan menciptakan kekacauan maka kita sama sekali tidak akan duduk diam.” (White, 2018).

Pada tahun 2019, pemimpin Tiongkok yaitu Xi Jinping menyerukan kembali reunifikasi kepada Taiwan dan ditanggapi oleh Tsai Ing Wen bahwa Tiongkok merupakan negara yang menentang nilai-nilai demokrasi dan tatanan global yang bebas melalui otoritanisme dimana berlawanan dengan Taiwan yang merupakan negara yang paling depan menjunjung nilai-nilai demokrasi (Ting-fang, 2019). Pada tanggal 10 Oktober 2018, Tsai juga memberikan pidato dalam *108th Anniversary of Founding of the Republic of China*. Dalam pidato tersebut, Tsai menolak ajakan Xi Jinping untuk bertemu membicarakan mengenai reunifikasi. Ia mengatakan bahwa kekacauan yang terjadi di Hong Kong merupakan akibat dari kegagalan model “Satu Negara Dua Sistem” yang tidak dapat berjalan

dengan baik sehingga Tsai sebagai Presiden Taiwan dengan tegas menolak reunifikasi dibawah gagasan tersebut (Chung, 2019). Ia juga mendukung protes yang dilakukan di Hong Kong pada tahun 2019 untuk menentang RUU Ekstradiksi terhadap Tiongkok. Dalam sebuah *tweet* yang diunggah pada akun sosial mediana, ia mengatakan bahwa dalam mengejar demokrasi dan kebebasan, Hong Kong tidak sendirian karena Taiwan akan memberikan dukungannya (Sergeant, 2019).

Meskipun reunifikasi dibawah model “Satu Negara Dua Sistem” akan memberikan kebebasan bagi Taiwan untuk mengatur kehidupannya sendiri, namun Taiwan dengan tegas tetap menolak ajakan reunifikasi yang dibuat oleh Tiongkok tersebut. Hal dikarenakan Demokrasi Taiwan tidak dapat berdiri dibawah komunisme Tiongkok sebagaimana apa yang terjadi di Hong Kong menunjukkan gagalnya demokrasi yang berdiri dibawah negara otoriter Tiongkok. Taiwan melihat pengalaman yang terjadi di Hong Kong akan menjadi gambaran sekilas mengenai apa yang akan terjadi pada Taiwan di masa depan ketika bersatu dengan Tiongkok. Taiwan menganggap Tiongkok sebagai ancaman bagi demokrasinya, sehingga tidak akan ada jaminan bagi demokrasi

Taiwan tetap dapat dipertahankan ketika bersatu kembali dengan Tiongkok mengingat Negeri Tirai Bambu bertambah semakin otoriter di bawah kepemimpinan Xi Jinping (Hass, 2019).

B. Taiwan Lebih Memilih untuk Menjadi Negara yang Berdaulat

Tiongkok yang menganggap Taiwan masih bagian dari kekuasaannya karena belum ada perjanjian resmi yang mengakhiri Perang Saudara tahun 1949 dan wilayah Taiwan masih menjadi satu kesatuan dengan Tiongkok. Namun bagi Taiwan, sejak para pemimpinnya mengalami kekalahan di Perang Saudara merasa tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok yang dikuasai oleh Komunis dan karena kegagalan dalam menguasai kembali wilayah Tiongkok membuat mereka lebih memilih untuk berfokus dalam menjalankan pemerintahannya sendiri sebagai sebuah negara yang terpisah dari Tiongkok. Sehingga, tidak ada suatu keperluan bagi Taiwan untuk menyatu kembali dengan Tiongkok (Chen, 2017).

Tiongkok merasa Taiwan masih bagian dari wilayah kedaulatannya yaitu sebagai salah satu provinsinya namun membangkan sehingga Tiongkok berusaha agar wilayah ini dapat tunduk kembali kepada Negeri Tirai Bambu. Meskipun demikian, Taiwan yang merasa bukan sebagai salah satu provinsi Tiongkok karena Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpin oleh komunis. Taiwan mengakui sebagai

bagian dari Tiongkok tetapi Tiongkok yang dimaksud adalah Republik Tiongkok (Negara Republik yang dibangun oleh Sun Yat Sen pada tahun 1912 ketika menggulingkan pemerintah monarki yang sudah berdiri sejak lama). Sehingga tidak ada suatu keperluan bagi mereka untuk tunduk kembali kepada Tiongkok melalui reunifikasi dibawah model “Satu Negara Dua Sistem”. Baik elit maupun publik Tiongkok menganggap diri mereka sebagai sebuah negara yang berdaulat dengan memiliki nama resmi Republik Tiongkok dan pusat pemerintahan di Taipei.

Terlepas dari pengaruh sejarah masa lalu dengan Tiongkok, Taiwan merasa kondisinya saat ini telah membuat mereka memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara. Sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal I Konvensi Montevideo mengenai Hak dan Kewajiban Negara. Dalam Artikel I menyebutkan bahwa negara yang berdaulat harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: a) populasi permanen, b) wilayah yang ditentukan, c) pemerintah, dan d) kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara lain (Convention on Right and Duties of States, 1933).

Pertama, Taiwan memiliki populasi yang permanen dengan jumlah penduduk sebesar 23.78 juta orang. Kedua, Taiwan memiliki wilayah yang ditentukan yang terdiri dari Pulau Taiwan dan pulau-pulau di sekitarnya seperti Pulau Kinmen, Pulau Matsu, Pulau Dongsha, dan Pulau Nansha. Ketiga, Taiwan memiliki pemerintahan

demokratis yang otonom. Keempat, Taiwan memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain yang terlihat dengan adanya hubungan diplomatik yang telah dilakukan dengan beberapa negara. Selain itu, Taiwan juga telah menandatangani beberapa perjanjian multilateral, serta merupakan anggota dari beberapa organisasi internasional (Koopman, 2019). Sehingga, meskipun Tiongkok dengan keras menentang Taiwan yang bertindak sebagai sebuah negara, Taiwan tetap berusaha untuk memperjuangkan kedaulatannya.

Ketika Tiongkok menawarkan reunifikasi dibawah model “Satu negara Dua Sistem” pada tahun 2014 silam, hal ini direson oleh taiwan dengan tidak baik karena baik elit maupun publik Taiwan menolak tawaran tersebut. Pada tahun 2014, ketika Xi Jinping pertama kali mengusulkan Reunifikasi di bawah model ini dimana akan menjadikan Taiwan sebagai Daerah Administratif Khusus, hal ini langsung ditanggapi oleh Ma Ying Jeou selaku mantan Presiden Taiwan dengan memberikan penolakan secara tegas terhadap upaya reunifikasi tersebut melalui sebuah konferensi pers (Lok-Sin, 2014). Begitu juga dengan Tsai Ing-Wen yang menggantikan posisi Ma di tahun 2016. Ia dengan tegas menolak reunifikasi dengan Tiongkok ketika pertama kali menjabat sebagai Presiden Taiwan. Tsai bahkan tidak mengakui Konsensus 1992 sebagai dasar untuk mengartikan *One China* (Romberg, 2018).

Dalam sebuah pidato yang disampaikan oleh Tsai Ing Wen pada tanggal 10 Oktober 2018, ia memberikan pesan kepada pemerintah komunis Tiongkok yaitu “*the People of Taiwan will never accept any attempt by external forces to unilaterally change the cross-Strait status quo*” (White, 2018). Pesan ini secara jelas menegaskan bahwa Taiwan menolak untuk mengubah status quo mereka sekarang yaitu Taiwan merupakan negara yang berdaulat dan tidak menginginkan untuk menerima seruan reunifikasi dibawah model “Satu Negara Dua Sistem” yang ditawarkan oleh Xi Jinping sejak tahun 2014 silam.

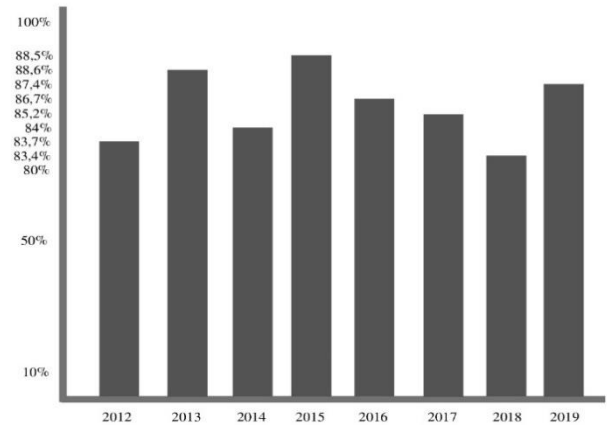
Ketika Xi Jinping kembali menyerukan reunifikasi pada tahun 2019, Tsai dengan tegas mengatakan bahwa Taiwan tetap menolak reunifikasi diantara Taiwan dan Tiongkok melalui pidato yang disampaikannya pada hari peringatan berdirinya Republik Tiongkok yang ke-108. Bagi Taiwan, dengan adanya reunifikasi diantara keduanya, maka tidak akan ada ruang bagi keberadaan Republik Tiongkok. Sebagai pemimpin Taiwan saat ini, Tsai akan berusaha untuk melindungi kedaulatan nasional Taiwan dengan tidak bersatu dengan Tiongkok (Chung, 2019).

Tsai juga memberikan pesan kepada Tiongkok bahwa mereka harus menghormati keputusan dari 23 juta orang Taiwan untuk hidup dalam kebebasan. Selain itu, Tsai juga menegaskan bahwa Taiwan perlu membangun “*Three Shields*” yaitu

melindungi mata pencaharian warga Taiwan, menjaga terhadap perang informasi Beijing termasuk disinformasi, dan memperkuat pengawasan dan regulasi mekanisme untuk interaksi lintas selat pada isu-isu yang dapat membahayakan kedaulatan Pulau Formosa. Tsai juga mengingatkan kepada Tiongkok untuk tidak berusaha memaksa masalah apa pun yang bersifat politik di Taiwan dan setiap kontak antara keduanya yang melibatkan partisipasi warga Taiwan harus dilakukan di bawah pengawasan pemerintah Taiwan (Chung, 2019).

Penolakan reunifikasi bukan hanya datang dari elit atau pemerintah Taiwan saja melainkan publik atau masyarakat Taiwan juga menolak terwujudnya reunifikasi antara Taiwan dan Tiongkok. Hal ini berdasarkan pada jajak pendapat yang dilakukan oleh Taiwan dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa mayoritas warga Taiwan tidak memiliki keinginan untuk mewujudkan reunifikasi dengan Tiongkok terutama dibawah model “Satu Negara Dua Sistem”.

Grafik 1.1.
Jajak Pendapat Pandangan Publik
Taiwan yang Menolak Reunifikasi



Sumber: *Mainland Affairs Council*

Untuk mengetahui pandangan orang-orang Taiwan mengenai masalah hubungan Lintas-Selat, Dewan Urusan Daratan Taiwan yang dikenal dengan *Mainland Affairs Council* (MAC) menugaskan *The Election Study Center of National Chengchi University* untuk melakukan jajak pendapat di wilayah Taiwan selama bertahun-tahun. Berdasarkan pada Grafik 1.1. mengenai jajak pendapat pandangan publik Taiwan yang menolak reunifikasi diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2012, mayoritas warga Taiwan sebanyak 83.7% dari 23.7 juta penduduk lebih memilih untuk mempertahankan status quo mereka (Mainland Affairs Council, 2012). Status quo yang dimaksud adalah Taiwan bukan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan merupakan negara berdaulat yang independen karena memenuhi semua kriteria kenegaraan yang ditetapkan oleh Konvensi Montevideo mengenai hak dan kewajiban sebagai sebuah negara (Roy, *The future of United States, China, and Taiwan relations*, 2011).

Pada tahun 2013, jajak pendapat kembali dilakukan dan hasilnya menunjukkan adanya peningkatan terhadap dukungan dari penduduk Taiwan untuk mempertahankan status quo yang sudah ada sejak lama yaitu sebesar 88.6% diandingkan dengan bersatu kembali dengan Negeri Tirai Bambu (Mainland Affairs Council, 2013). Pada tahun 2014, ketika Xi Jinping pertama kali mengusulkan reunifikasi dibawah model “Satu Negara Dua Sistem” (*One Country Two System*). Hal ini ditanggapi oleh Taiwan dengan menolak kebijakan tersebut yang ditunjukkan dengan hasil jajak pendapat bahwa sebanyak 84% penduduk Taiwan memilih untuk mempertahankan status quo (Mainland Affairs Council, 2014).

Pada tahun 2015, jajak pendapat yang menunjukkan sikap Taiwan terhadap usulan reunifikasi yang dibuat oleh Tiongkok ditolak oleh mayoritas warga Taiwan sebanyak 88.5% dari total penduduk Taiwan sebanyak 23.7 juta jiwa. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan yang begitu besar sejak Xi Jinping memimpin Tiongkok dan mengusahakan untuk terwujudkan reunifikasi dengan Taiwan (Mainland Council Affairs, 2015). Pada tahun 2016, jajak pendapat menunjukkan sebanyak 86.7% menolak untuk bersatu dengan Tiongkok. Orang-orang Taiwan menyerukan bahwa Daratan Tiongkok harus menghadapi kenyataan jika kedua belah pihak baik Tiongkok maupun Taiwan merupakan dua pemerintahan secara terpisah dan

mereka harus menghormati akan hal tersebut (Mainland Affairs Council, 2016).

Pada tahun 2017, menunjukkan bahwa sebanyak 85.2% mendukung sikap pemerintah yang secara tegas mempertahankan kedaulatan, martabat nasional, dan kesejahteraan rakyat Taiwan sehingga mereka menolak usulan reunifikasi dan lebih memilih mempertahankan status quo (Mainland Affairs Council, 2017). Pada tahun 2018, jajak pendapat dilakukan dari tanggal 24 hingga 28 Oktober dan memberikan hasil yang menunjukkan sikap Taiwan yang menolak reunifikasi 83.4%. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan status quo (Mainland Affairs Council, 2018). Jajak pendapat terbaru yang dilakukan pada tahun 2019, menunjukkan bahwa sebanyak 87.4% tidak setuju dengan inisiatif “Satu Negara Dua Sistem” (Mainland Affairs Council, 2019).

Meskipun bagi Tiongkok, reunifikasi dibawah model “Satu Negara Dua Sistem” akan memberikan keuntungan terhadap Taiwan. Keuntungan yang didapatkan oleh ialah Taiwan akan diberikan konsesi dengan dijadikan sebagai Daerah Administratif Khusus yang akan mendapatkan keistimewaan dengan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri, hak dan kebebasannya akan dijamin oleh pemerintah Tiongkok, serta tidak akan ada intervensi dari Tiongkok terhadap Taiwan. Namun bagi Taiwan, reunifikasi tidak akan memberikan keuntungan bagi negaranya karena

tanpa bersatu kembali dengan Tiongkok, Taiwan tetap memiliki keistimewaan seperti yang ditawarkan pada model “Satu Negara Dua Sistem”. Oleh karena itu, reunifikasi ini hanya akan memberikan kerugian bagi negaranya. Taiwan harus melepaskan kedaulatannya ke tangan Tiongkok yang menyebabkan Taiwan akan kehilangan identitasnya sebagai sebuah negara yang sudah lama dipertahankan sejak tahun 1949 (Cole, 2015).

Mayoritas warga Taiwan merasa bahwa mereka sudah menjadi sebuah negara yang berdaulat yang sudah ada sejak tahun 1949. Sehingga, mereka lebih memilih untuk mempertahankan status quo daripada bersatu dengan Tiongkok. Penduduk Taiwan telah mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Taiwan, bukan orang Tiongkok. Identitas ini telah mengalami perubahan secara signifikan sejak pulau ini menjadi negara demokrasi pada tahun 1990-an dan begitu kuat ketika mereka dipimpin oleh Tsai In-Weng sejak tahun 2016 silam.

Bagi elit Tiongkok, Taiwan merupakan sebuah negara yang independen yang telah merdeka secara *de jure* dan Taiwan masih memperjuangkan untuk terus mendapatkan pengakuan dari negara lain atau *de facto*. Taiwan sendiri telah menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara sejak Pulau Formosa menjadi negara demokratis pada tahun 1990-an yang di pimpin oleh Lee Teng Hui pada saat itu. Hingga sekarang, di bawah pemerintahan Tsai In Weng,

Taiwan terus mencoba melakukan pendekatan dengan negara-negara lain untuk meningkatkan hubungan kerjasama. Bahkan terlihat pada tahun 2019, Tsai In-Weng sering melakukan kunjungan ke negara-negara yang menjadi sekutu diplomatik Taiwan. kunjungan-kunjungan tersebut agar memastikan mereka tetap mengakui dan mendukung Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat (Lee, 2019).

Tindakan Taiwan yang berusaha untuk mempertahankan kedaulatannya sebagai sebuah negara yang independen ini tentu saja begitu kontras dengan apa yang diharapkan oleh Tiongkok. Tiongkok menginginkan Taiwan mengakui Tiongkok sebagai negaranya sehingga Tiongkok yang mengharapkkkan terwujudnya reunifikasi diantara keduanya dengan melakukan berbagai upaya agar tujuan Tiongkok dapat terwujud. Namun, tindakan Taiwan yang menganggap dirinya sebagai negara berdaulat dan selalu berusaha untuk memperjuangkan kedaulatannya tersebut meskipun selalu di halangi oleh Tiongkok, membuat Taiwan begitu jauh dari “reunifikasi”. Hal ini yang kemudian menghambat Tiongkok belum bisa mewujudkan reunifikasi yang dapat membuat Taiwan mengakui sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok.

KESIMPULAN

Meskipun Tiongkok telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan, sampai sekarang belum ada titik keberhasilan yang dicapai

oleh Tiongkok. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mewujudkan reunifikasi diantaranya terdapat perbedaan ideologi politik antara Tiongkok dan Taiwan. Tiongkok yang menganut ideologi komunis menjadikannya sebagai negara yang otoriter. Sedangkan Taiwan yang menganut paham demokrasi sehingga menjunjung tinggi kebebasan. Tentu saja perbedaan ideologi politik ini memberikan pengaruh besar terhadap terhambatnya reunifikasi diantara Tiongkok dan Taiwan karena keduanya berlawanan antar satu sama lain. Meskipun Tiongkok menganggap hal ini bukan menjadi masalah besar karena Taiwan dapat mempertahankan ideologinya melalui reunifikasi dibawah model “Satu Negara Dua Sistem”, bagi Taiwan ideologi demokrasi tidak dapat berdiri dibawah pemerintahan komunis sebagaimana apa yang terjadi pada Hong Kong saat ini menunjukkan bahwa gagalnya model “Satu Negara Dua Sistem” yang membuat Taiwan khawatir ketika menyatu dengan Tiongkok maka akan mengancam bagi demokrasi Taiwan.

Faktor lain yang memberikan pengaruh besar terhadap terhambatnya Tiongkok dalam mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan yaitu sikap Taiwan yang lebih memilih menjadi negara yang berdaulat. Bagi Taiwan, dengan adanya sejarah masa lalu yang tidak baik, mereka sudah bukan merupakan bagian dari Tiongkok sehingga Taiwan lebih memilih berdiri sendiri sebagai negara yang independen. Selain itu, adanya tuntutan baik dari elit maupun publik Tiongkok untuk menjadikan Taiwan sebagai negara yang berdaulat seutuhnya tanpa adanya pengaruh

dari Tiongkok membuat Taiwan tidak menginginkan bergabung dengan Tiongkok. Sehingga, hal ini membuat Tiongkok mengalami hambatan dalam mewujudkan reunifikasi diantara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Faust, J. F. (2005). *China in World Politics*. Canada: Lynne Rienner Publisher. Inc. Retrieved June 15, 2019
- Lijun, S. (2001). *China's Dilemma: The Taiwan Issue*. Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies. Retrieved Mei 11, 2019
- Roy, C.-y. L. (2011). *The future of United States, China, and Taiwan relations*. New York: Palgrave Macmillan. Retrieved December 11, 2019
- Wicaksono, M. (2017). *Republik Rakyat China: Dari Mao Zedong sampai Xi Jinping*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Retrieved January 1, 2019

Dokumen

- Convention on Right and Duties of States. (1933, December 26). *Montevideo Convention on the Right and Duties of States*. Retrieved November 26, 2019, from International Law Students Association
- Kementerian Luar Negeri Taiwan. (2019). *2018-2019 Sekilas Taiwan*. Kementerian Luar Negeri Republik of China (Taiwan). Retrieved November 26, 2019

- Mainland Affairs Council. (2013, March). *Summarized Results of the Public Opinion Survey on "Public Views on Current Cross-Strait Relations*. Retrieved December 2012, 2019, from Mainland Affairs Council Republic of China (Taiwan)
- Mainland Affairs Council. (2017, October 3). *Public Opinion Strongly Approves the Policy Position of Cross-Strait Peace and Support Communication and Dialogue between the Two Sides without Preconditions*. Retrieved December 12, 2019, from Mainland Affairs Council Republic of China (Taiwan)
- Mainland Affairs Council. (2018, October 28). *Summarized Results of the Public Opinion Survey on the "Public's View on Current Cross-Strait Relations*. Retrieved December 12, 2019, from Mainland Affairs Council Republic of China (Taiwan)
- Mainland Affairs Council. (2019, October 21). *Summarized Results of the Public Opinion Survey on the "Public's View on Current cross-Strait Relations*. Retrieved December 12, 2019, from Mainland Affairs Council Republic of China

Jurnal

- Andrade, T. (2004). *The Rise and Fall of The Spanish and Dutch on Taiwan, 1624-1662*. Retrieved October 13, 2019
- Birbudak, T. S. (2017). *The Sino-Japanese War of 1894-1895 and The Ottoman*

Empire. 203. Retrieved May 11, 2019

- Haas, M. (1984). *Paradigms of Political Integration and Unification: Applications to Korea*. Retrieved June 20, 2019
- Hass, R. B. (2019). *Taiwan's democracy and the China*. Foreign Policy at Brookings. Retrieved November 26
- Jacobs, B. (2011). *The History of Taiwan. The China Journal*, 196. Retrieved October 13, 2019
- Koopman, K. Y. (2019). *Taiwan's Path to Independence: Resolving the "One China" Dispute*. Retrieved November 26, 2019
- Romberg, A. D. (2018). *Across the Taiwan Strait: from Cooperation to Confrontation? 2013-2017*. Stimson. Retrieved December 13, 2019

Website

- Aulia. (2019, September 6). *Kematian Demokrasi Di Hong Kong?* Retrieved December 12, 2019, from Geotimes: <https://geotimes.co.id/op-ed/kematian-demokrasi-di-hong-kong/>
- Central Intelligence Agency. (2019). *East Asia/South Asia: China*. Retrieved June 15, 2019, from Central Intelligence Agency: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>

- Chen, F.-Y. (2017, January 2). The Taiwanese see themselves as Taiwanese, not as Chinese. Retrieved November 26, 2019, from The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/01/02/yes-taiwan-wants-one-china-but-which-china-does-it-want/>
- Chung, L. (2019, October 10). Taiwan's President Tsai Ing-wen urges rejection of 'one country, two systems' model she says fails Hong Kong. Retrieved December 12, 2019, from South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3032303/taiwans-president-tsai-ing-wen-urges-rejection-one-country-two>
- Cole, J. M. (2015, May 19). What Would Taiwan Actually Gain from Reunification with China? Retrieved December 12, 2019, from The National Interest: <https://nationalinterest.org/feature/what-would-taiwan-actually-gain-reunification-china-12916>
- Devries, M. D. (2019, March 14). Chinese State-Society Relations: Why Beijing Isn't Trembling and Containment Won't Work. Retrieved November 26, 2019, from Carnegie Endowment for International Peace: <https://carnegieendowment.org/2019/03/14/chinese-state-society-relations-why-beijing-isn-t-trembling-and-containment-won-t-work-pub-78596>
- Lee, Y. (2019, March 12). Taiwan president to visit Pacific allies amid China pressure. Retrieved November 26, 2019, from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-taiwan-politics/taiwan-president-to-visit-pacific-allies-amid-china-pressure-idUSKBN1QT06K>
- Lok-Sin, A. H. (2014, September 27). Officials reject Xi Jinping's 'solution'. Retrieved December 7, 2019, from Taipei Times: <http://www.taipetimes.com/News/front/archives/2014/09/27/2003600667>
- Mainland Affairs Council. (2012, December 14). Public Opinion on Cross-Strait Relations in the Republic of China (2012-11). Retrieved December 12, 2019, from Mainland Affairs Council Republic of China (Taiwan): https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=A921DFB2651FF92F&sms=37838322A6DA5E79&s=C061EEA5CB2627D4
- Mainland Affairs Council. (2014, December 25). Public Opinion on Cross-Strait Relations in The Republic of China (2014-12). Retrieved December 12, 2019, from Mainland Affairs Council Republic of China (Taiwan): https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=2BA0753CBE348412&sms=E828F60C4AFBAF90&s=40FD40BE9E4C2058
- Mainland Affairs Council. (2015, November 13). Public Opinion on Cross-Strait Relations in The Republic of China (2015-11). Retrieved December 12,

- 2019, from Mainland Council Affairs Republic of China (Taiwan): https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=2BA0753CBE348412&sms=E828F60C4AFBAF90&s=1C FBF782CA3871C1
- Mainland Affairs Council. (2016, March 26). Public Opinion on Cross-Strait Relations in The Republic of China (2016-3). Retrieved December 12, 2019, from Mainland Affairs Council Republic of China (Taiwan): https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=2BA0753CBE348412&sms=E828F60C4AFBAF90&s=C6929B2FB98B202A
- Marboen, A. P. (2015, November 4). Sejarah singkat Taiwan sejak 1949. Retrieved November 26, 2019, from Antara News: <https://www.antaraneews.com/berita/527377/sejarah-singkat-taiwan-sejak-1949>
- Mubarok, M. Y. (2017). Problem Teologis Ideologi Komunisme. *Tsaqafah (Jurnal Peradaban Islam)*. Retrieved November 26, 2019, from <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/976>
- Parmer, S. (2019, October 4). China-Taiwan Relations. Retrieved September 28, 2019, from Council of Foreign Relations: <https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations>
- Ricking, C. (2014, October 2). Taiwan's view of the Hong Kong protests. Retrieved December 12, 2019, from Deutsche Welle: <https://www.dw.com/en/taiwans-view-of-the-hong-kong-protests/a-17969838>
- Salengke, H. H. (2016, May 24). Menakar Masa Depan Taiwan. Retrieved November 26, 2019, from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/read/detail/46865-menakar-masa-depan-taiwan.html>
- Sen, S. Y. (1924). *San Min Chu I: The Three Principles of The People*. (F. W. Price, Trans.) Retrieved November 26, 2019, from Chinese Larouchepub.
- Sergeant, G. (2019, August 24). Cross-Strait solidarity: Hongkongers and Taiwanese know they have to help save each other. Retrieved December 12, 2019, from Hong Kong Free Press: <https://www.hongkongfp.com/2019/08/24/cross-strait-solidarity-hongkongers-taiwanese-know-help-save/>
- Ting-fang, L. L. (2019, October 10). Taiwan's Tsai: China's 'one country, two systems' model has failed. Retrieved December 12, 2019, from Nikkei Asian Review: <https://asia.nikkei.com/Politics/Taiwan-s-Tsai-China-s-one-country-two-systems-model-has-failed>
- Vector Stock. (2019, October 2). Gray China Map. Retrieved 2019, from Vector Stock: <https://www.vectorstock.com/royalty>

-free-vector/gray-china-map-vector-1606371

White, E. (2018, October 10). Taiwan accuses China of threatening international stability. Retrieved December 12, 2019, from Financial Times:
<https://www.ft.com/content/ef9f9688-cc4a-11e8-b276-b9069bde0956>

Wong, C. H. (2019, January 2). Taiwan Leader Rejects Unification Under Heightened Pressure From China's Xi. Retrieved June 15, 2019, from The Wall Street Journal:
<https://www.wsj.com/articles/taiwan-leader-rejects-unification-under-heightened-pressure-from-chinas-xi-11546428688>